

Buku Panduan Akses OECD Indonesia untuk Dunia Usaha



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA



KADIN INDONESIA

Supported by



UK International
Development

Partnership | Progress | Prosperity

 **GROWTH
GATEWAY**
GLOBAL PROSPERITY THROUGH
TRADE & INVESTMENT

 UK Government

Buku Panduan Aksesasi OECD Indonesia untuk Dunia Usaha

Sasaran Pembaca

Buku panduan ini memberikan gambaran umum mengenai proses aksesasi OECD dan diperuntukan sebagai referensi bagi dunia usaha Indonesia—mencakup KADIN sebagai payung organisasi dunia usaha, asosiasi bisnis, perusahaan besar, serta UMKM

Tujuan

- 1. Menjelaskan manfaat strategis keanggotaan OECD bagi Indonesia**, termasuk perannya dalam memperkuat kredibilitas ekonomi, kualitas kebijakan, kepercayaan investor, posisi Indonesia di tingkat internasional, serta keberlanjutan reformasi jangka panjang
- 2. Membangun pemahaman mengenai proses aksesasi OECD**, termasuk sebagai referensi tentang OECD, cakupan aksesasi, dan bagaimana kesiapan dinilai
- 3. Menginformasikan aspek-aspek utama aksesasi OECD yang relevan bagi dunia usaha**, termasuk gambaran komite utama dan prinsip-prinsip utama yang berdampak bagi bisnis
- 4. Menjelaskan peran dunia usaha dalam proses aksesasi**, termasuk keterlibatan dalam diskusi selama misi OECD, pemberian masukan untuk membentuk opsi dan tahapan reformasi, dll.

Buku Panduan ini disusun secara kolaboratif dengan melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Organisation of Economic Co-operation and Development (OECD), dan Business at OECD (BIAC), dan didukung oleh Program Growth Gateway dari Pemerintah Inggris

Buku panduan ini disusun berdasarkan diskusi dengan para ahli, materi OECD yang tersedia untuk publik, dan riset sekunder per April 2026. Namun, proses aksesasi OECD bersifat dinamis dan masih berproses, sehingga bentuk akhir, waktu pelaksanaan, serta dampak reformasi terhadap dunia usaha dapat berbeda dalam praktik.

BAB 1: Agenda Transformasi Ekonomi Indonesia dan Akses OECD

Indonesia telah menetapkan ambisi jangka panjang untuk menjadi negara berpendapatan tinggi pada tahun 2045

Indonesia Emas 2045: Visi jangka panjang untuk menjadi negara berpendapatan tinggi

Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan



Bersatu:
mencakup kesatuan kuat berdasarkan Pancasila dan semangat Bhineka Tunggal Ika



Berdaulat:
mencakup Ketahanan, Kesatuan, Mandiri, Aman, Tangguh



Maju:
mencakup Berdaya, Modern, Tangguh, Tangguh, Inovatif, Adil



Berkelanjutan:
mencakup Lestari dan seimbang antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan

Ambisi ini diterjemahkan ke dalam aksi melalui RPJMN 2025–2029 sebagai tahap pelaksanaan pertama

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 menyusun Indonesia Emas 2045 ke dalam 4 fase Pembangunan:



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 mengoperasionalkan Fase 1 RPJPN 2025–2045, dengan fokus pada perkuatan fondasi transformasi

Fase pertama transformasi dinilai melalui lima sasaran pembangunan nasional

Target RPJMN 2025-2029

01 Meningkatkan Pendapatan per Kapita menuju setara Negara Maju

	2025	2029
• Pertumbuhan ekonomi	5.3%	8%
• GNI per kapita meningkat dari	USD 5,410	USD 8,000
• Kontribusi sektor maritim terhadap PDB meningkat dari	8.1%	9.1%
• Kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB meningkat dari	20.8%	21.9%

03 Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang

	2025	2029
• Tingkat kemiskinan menurun dari ; kemiskinan ekstrem (PPP USD 2.15) < 0.5% (2026)	7.0-8.0%	4.5-5.0%
• Rasio Gini menurun dari	0.378-0.382	0.372-0.375
• Kontribusi Kawasan Timur Indonesia (KTI) terhadap PDRB meningkat dari	21.4%	22.4%

05 Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission

	2025	2029
• Intensitas emisi GRK ¹ menurun dari	35.53%	45.17%
• Indeks Kualitas Lingkungan meningkat dari	76.49	77.20

1. Gas Rumah Kaca

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029

02 Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat

	2025	2029
• Global Power Index meningkat dari	33 rd	29 th

04 Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat

	2025	2029
• Indeks Modal Manusia (IMM) meningkat dari	0.56	0.59

Mencapai pertumbuhan 8% pada 2029 akan memerlukan dorongan baru dalam aktivitas ekonomi dan investasi, ditopang oleh kelanjutan reformasi struktural

01



Meningkatkan Pendapatan per Kapita menuju setara Negara Maju

2025

2029

Pertumbuhan ekonomi

5.3%

8%

GNI per kapita meningkat dari

USD 5,410

USD 8,000

Kontribusi sektor maritim terhadap PDB meningkat dari

8.1%

9.1%

Kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB meningkat dari

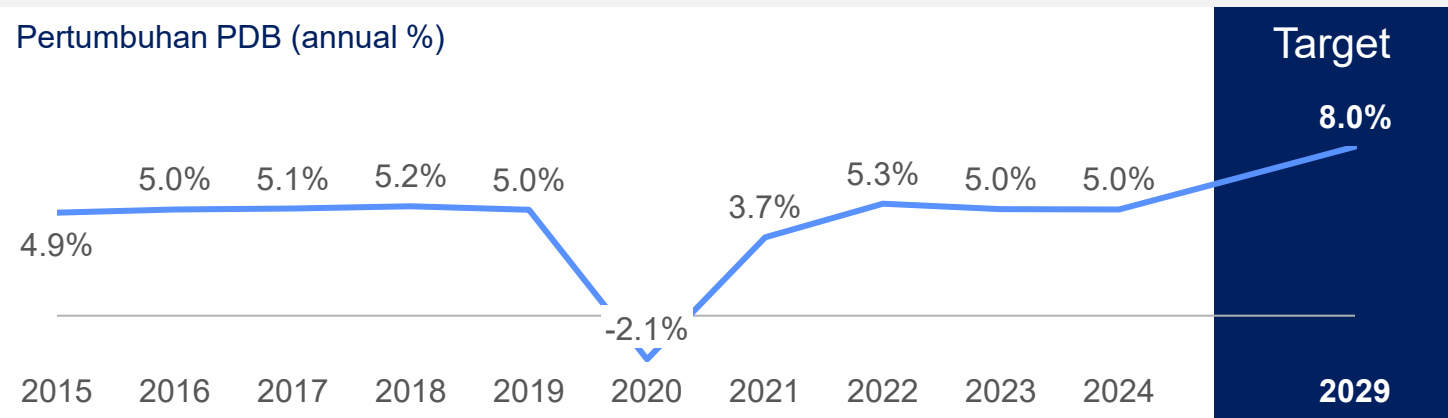
20.8%

21.9%



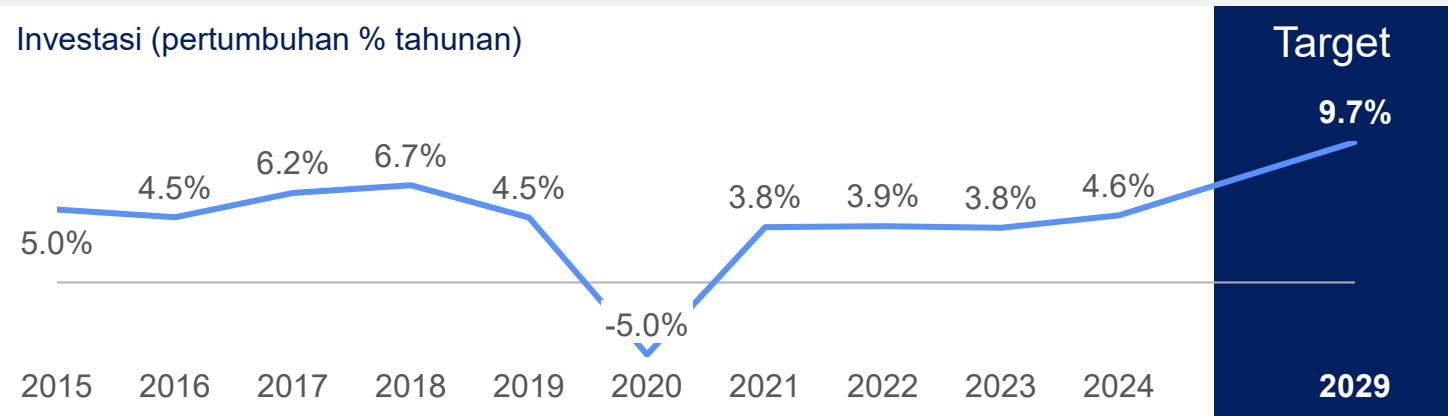
Pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar ~5% dalam satu dekade terakhir...

Pertumbuhan PDB (annual %)



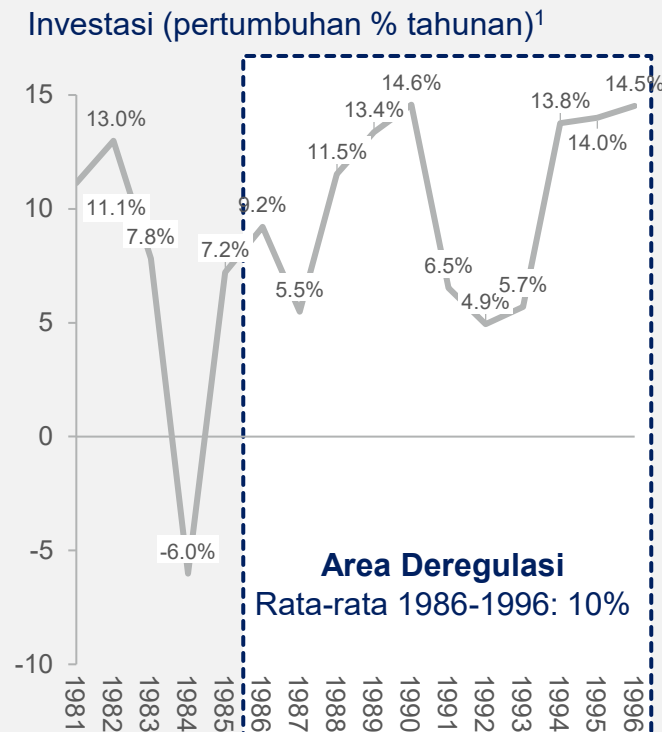
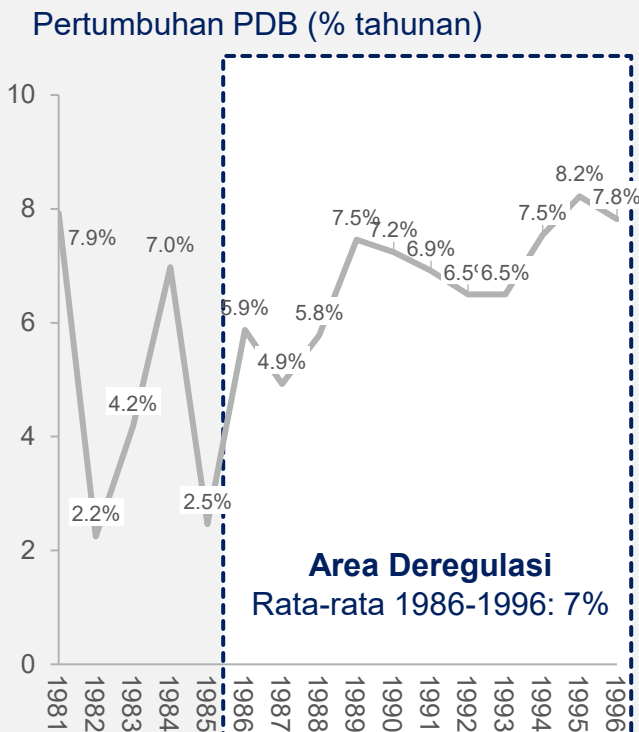
...dan pertumbuhan investasi berada di ~3–5% dalam beberapa tahun terakhir

Investasi (pertumbuhan % tahunan)



Pelajaran dari periode sebelumnya, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dapat dicapai melalui reformasi dan deregulasi

Pelajaran dari periode 1980-an–1990-an: deregulasi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan pertumbuhan investasi dua digit di Indonesia



Reformasi Deregulasi sejak 1980-an (Ilustrasi contoh utama)

- **Deregulasi Perpajakan 1984–1986**
Penyederhanaan administrasi perpajakan dan kepabeanan
- **Deregulasi Perdagangan 1985**
Reformasi tarif secara komprehensif
- **Deregulasi Perdagangan 1986**
Pengurangan pembatasan izin impor
- **Deregulasi Investasi 1986**
Penyederhanaan prosedur persetujuan investasi
- **Deregulasi Perbankan 1988**
Mempermudah masuknya bank-bank baru
- **Deregulasi Pasar Modal 1988**
Pembentukan pasar surat berharga swasta
- **Deregulasi Keuangan 1989**
Penguatan kerangka regulasi dalam sektor perbankan
- **Deregulasi Perdagangan 1992**
Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN
- **Deregulasi Perdagangan 1995**
Indonesia bergabung dengan World Trade Organisation

Hingga saat ini, deregulasi dan reformasi pemerintahan terus berlanjut agar tetap relevan dan responsif terhadap perkembangan zaman (misal, pembentukan KPK (2002), penguatan BPK dan reformasi keuangan negara (2003-2006), UU Cipta Kerja (2020-2023), dll.).

1. Gross fixed capital formation mengukur investasi pada aset jangka panjang seperti bangunan, infrastruktur, dan mesin, setelah memperhitungkan aset yang dijual atau dipensiunkan
Source: World Bank, Center for Indonesian Policy Studies

Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 2029, Indonesia membutuhkan reformasi, deregulasi, dan integrasi yang lebih dalam dengan ekonomi global

Diperlukan upaya terintegrasi untuk mencapai ambisi pertumbuhan 8%



Dengan latar belakang ini, RPJMN menetapkan 8 prioritas strategis untuk mendukung pertumbuhan yang lebih tinggi

- 1 Peningkatan produktivitas pertanian menuju swasembada pangan
 - 2 Industrialisasi (hilirisasi): Padat karya, berorientasi ekspor, dan berkelanjutan
 - 3 Pariwisata dan ekonomi kreatif
 - 4 Ekonomi biru dan ekonomi hijau
 - 5 Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi
 - 6 Transformasi Digital
 - 7 **Investasi: FDI berorientasi ekspor dan investasi non-APBN**
 - 8 Belanja negara untuk produktivitas, termasuk: Makanan bergizi gratis, pembangunan 3 juta rumah, dll.
- + **Deregulasi perijinan serta kebijakan fiskal dan moneter *pro-growth***



Mencapai pertumbuhan 8% yang berkelanjutan mengharuskan Indonesia untuk **mengadopsi standar global dan melakukan reformasi kebijakan dan peraturan yang komprehensif** untuk menarik investasi asing

Indonesia telah melakukan berbagai inisiatif global untuk mengejar ambisi pertumbuhan, dengan akses OECD sebagai salah satu katalis reformasi utama

Partisipasi lembaga-lembaga global



Indonesia adalah anggota aktif **WTO, IMF, dan World Bank**, mendukung aturan perdagangan, stabilitas keuangan, dan pengembangan keuangan

Integrasi perdagangan dan ekonomi



Indonesia berpartisipasi dalam **kemitraan ekonomi utama** (misalnya G20, RCEP, APEC, BRICS, dan FTAs), untuk memperluas hubungan perdagangan dan akses pasar

Kepemimpinan Global



Indonesia tidak hanya berperan aktif dalam forum global namun turut serta memegang tongkat kepemimpinan, salah satunya melalui **Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022**.

Kemitraan dan Akses OECD



Indonesia telah menjadi **mitra utama OECD sejak 2007** dan negara **Akses Asia Tenggara pertama sejak 2024**



Akses OECD sebagai katalis reformasi untuk menyelaraskan standar Indonesia dengan praktik terbaik global dan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang

BAB 2: Manfaat Akses OECD dan Pembelajaran yang Dipetik



Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

OECD adalah organisasi internasional di mana pemerintah bekerja sama untuk menemukan solusi untuk tantangan bersama, mengembangkan standar global, berbagi pengalaman dan mengidentifikasi praktik terbaik untuk mempromosikan **kebijakan yang lebih baik untuk kehidupan yang lebih baik**



38

Negara-negara anggota bekerja dengan lebih dari 100+ ekonomi



80%

Dari perdagangan dunia dan investasi, 60% dari PDB Global (anggota & mitra)



300+

Komite, *Working Parties*, dan kelompok ahli



500+

Laporan dan *Policy Paper* Global per tahun



450+

Standar internasional yang dikembangkan

38 negara anggota OECD tersebar di seluruh dunia, dari Amerika Utara dan Amerika Selatan ke Eropa dan Asia-Pasifik



Indonesia berada di jalur untuk menjadi anggota OECD pertama di Asia Tenggara

2 Negara Asia

.....

9 Negara Berkembang¹

.....

8 negara yang saat ini sedang menjalani proses aksesi OECD

1. MSCI telah mengklasifikasikan pasar negara berkembang dan berkembang sejak diperkenalkannya MSCI Emerging Markets Index pada tahun 1988. Kerangka klasifikasi MSCI didasarkan pada penilaian tiga dimensi: 1) pembangunan ekonomi, 2) ukuran dan likuiditas pasar ekuitas, 3) aksesibilitas pasar bagi investor asing
 Sumber: OECD, MSCI

Bagi Indonesia, akses OECD dapat berfungsi sebagai katalis untuk keluar dari *middle-income trap* dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045

Tantangan *middle-income trap*



OECD mengidentifikasi hambatan umum yang menyebabkan *middle-income trap*:

- Kurangnya Investasi Berkualitas
- Tantangan Tata Kelola
- SDM Dan Kapasitas Inovasi yang Rendah
- Kurangnya Kerangka Regulasi

Pentingnya Akses OECD ke Indonesia

- Keluar dari *middle-income plateau* untuk mencapai **status negara ekonomi tinggi pada tahun 2045**.
- Menyediakan **landasan reformasi struktural** bagi Indonesia untuk memperkuat tata kelola, mendorong investasi, keterbukaan, inovasi, dan pertumbuhan hijau.
- Akses OECD telah **diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang Nasional** untuk mempercepat reformasi struktural di bidang ekonomi, tata kelola, dan sosial

Akses OECD memberikan **manfaat strategis** bagi Indonesia untuk keluar dari *middle-income trap*

- 

1 Mendukung reformasi struktural yang berkelanjutan di Indonesia
- 

2 Memajukan keselarasan kebijakan dan peraturan dengan standar ekonomi maju
- 

3 Meningkatkan kredibilitas global dan kepercayaan investor
- 

4 Memperkuat perdagangan dan investasi, terutama melalui kolaborasi teknologi
- 

5 Memperluas akses pasar untuk komoditas ekspor domestik
- 

6 Meningkatkan kualitas layanan kesehatan, pendidikan, penciptaan lapangan kerja, dan infrastruktur

How this translates into private sector impact

Aturan & Level Playing Field yang Dapat Diprediksi

(lingkungan regulasi & bisnis yang lebih pasti, beban kepatuhan yang lebih rendah)

Bisnis Lintas Negara yang Lebih Sederhana

(hambatan yang berkurang dan standar yang lebih selaras, integrasi yang lebih dalam ke rantai nilai global)

Lebih Banyak Kemitraan & Biaya Modal yang Lebih Rendah

(akses terhadap FDI dari negara OECD lain, biaya pinjaman yang lebih rendah, peningkatan kualitas SDM)

Pelajaran dari Aksesori OECD terpilih | Kisah sukses dari aksesori OECD terbaru negara non-Uni Eropa dengan titik awal yang sebanding dengan Indonesia

Pokok Pembelajaran Utama dari Aksesori OECD Terpilih



Negara & Tahun Aksesori OEC



Relevansi dengan Indonesia

Kosta Rika



2021

- **Aksesori OECD yang terbaru**
- **Titik awal sebanding** dengan Indonesia, dengan kesenjangan reformasi yang relatif signifikan
- **Salah satu perekonomian dengan intensitas FDI tertinggi di dunia** (rasio FDI terhadap PDB sebesar 5,53% dibandingkan rata-rata global 1,94% pada 2024)

Kolombia



2020

- **Titik awal yang sebanding dengan Indonesia**, dengan kesenjangan reformasi yang signifikan
- **Profil ekonomi yang serupa** (misalnya tingkat PDB per kapita yang sebanding)
- **Perekonomian besar yang sedang melakukan reformasi** dengan momentum pertumbuhan yang kuat (pertumbuhan Q1 2025: Kolombia 0,8% vs. rata-rata OECD ~0,1%)

Korea Selatan



1996

- **Salah satu dari sedikit perekonomian Asia** yang bergabung dengan OECD
- **Titik awal yang sebanding dengan Indonesia**, dengan kesenjangan reformasi yang relatif signifikan
- **Reformator terbesar** (dalam liberalisasi kebijakan FDI) berdasarkan OECD FDI Regulatory Restrictiveness Index (1997–2010)



Kosta Rika | Reformasi yang selaras dengan OECD yang dilaksanakan selama aksesinya meningkatkan investasi asing, perdagangan, dan keberlanjutan

Fakta negara 2024

PDB: USD 77 miliar

Populasi: 5,1 juta orang

PDB per kapita: USD 18k

Waktu Akses: 4-5 tahun (dari IM)

2012 | Permohonan resmi

2015 | Peta jalan untuk Akses

2016 | *Initial Memorandum*

2021 | Keanggotaan resmi dikonfirmasi

Dampak positif aksesinya OECD Kosta Rika

Leading Indicator

0.04

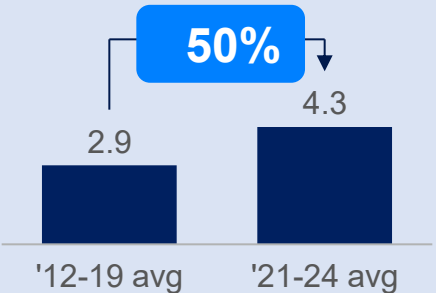
Indeks Pembatasan Regulasi FDI⁴
(0,16 untuk negara non-OECD (2024))

0.16

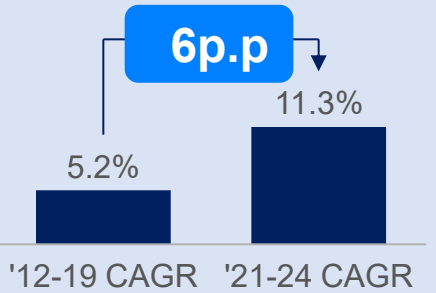
Indeks Pembatasan Perdagangan Jasa⁵
(0.30 untuk negara non-OECD (2025))

Lagging Indicator

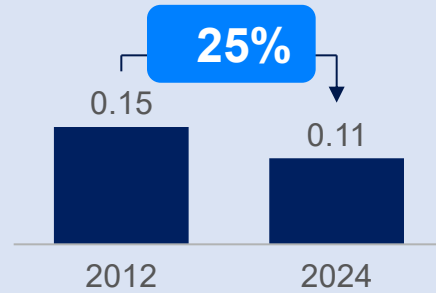
Investasi Asing Langsung¹, \$ bn



Pertumbuhan CAGR Ekspor², %



Intensitas karbon PDB³, kgCO₂e



Reformasi Utama (terkait kebijakan investasi dan lingkungan)

- Liberalisasi investasi progresif di sektor-sektor utama** (misalnya mengizinkan bank asing mendirikan cabang lokal), sehingga meningkatkan akses pasar dan opsi pembiayaan bagi dunia usaha
- Pelebagaan OECD RBC melalui sebuah badan koordinasi** untuk mendorong kesadaran, koherensi kebijakan, dan saluran penyelesaian sengketa non-yudisial bagi perusahaan besar maupun UMKM
- Penerapan peta jalan dekarbonisasi nasional jangka panjang**, termasuk paket kebijakan yang memandu elektrifikasi transportasi, energi bersih, pertanian berkelanjutan, dan lain-lain, sehingga memberikan sinyal yang lebih jelas dan peluang baru bagi investasi hijau

1. Peningkatan rata-rata arus masuk bersih FDI dari 2011–2019 ke 2021–2024, dalam \$ saat ini; 2. Ekspor barang dan jasa, dalam \$ konstan tahun 2015; 3. Penurunan antara tahun pengajuan resmi untuk bergabung dengan OECD (2012 untuk Kosta Rika) dan 2024 dalam kg CO₂e, dengan \$ konstan tahun 2015; 4. Mengukur pembatasan regulasi yang bersifat statutori terhadap FDI di berbagai negara dan sektor (0 = sepenuhnya terbuka untuk investasi asing; 1 = sepenuhnya tertutup); 5. Mengukur hambatan regulasi terhadap perdagangan dan investasi di sektor jasa (0 = sepenuhnya terbuka untuk investasi asing; 1 = sepenuhnya tertutup)

Sumber: World Bank, wawancara ahli dengan mantan Koordinator Urusan OECD dan aksesinya Kosta Rika ke OECD di Kementerian Perdagangan Luar Negeri Kosta Rika



Kosta Rika - Pendalaman| Reformasi yang dilaksanakan dan dampaknya terhadap dunia usaha

Reformasi yang dilaksanakan di Kosta Rika (tidak lengkap)

	Detail reformasi	Bagaimana sektor bisnis Kosta Rika terpengaruh
 <p>Masuknya Bank asing (UU 9724)</p>	<p>Mengizinkan bank asing untuk beroperasi melalui cabang lokal, tidak hanya melalui anak perusahaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lebih banyak pilihan perbankan untuk perusahaan, terutama di perusahaan, perdagangan, dan layanan keuangan lintas batas • Akses yang lebih mudah ke layanan perbankan internasional, mendukung impor, ekspor, dan operasi lintas batas
 <p>RBC NCP (Keputusan Eksekutif 40970-COMEX-MEIC)</p>	<p>Membentuk National Contact Point (NCP) untuk menerapkan pedoman perilaku bisnis yang bertanggung jawab</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan besar meresmikan praktik RBC dan ESG, dengan sekitar 70% mengadopsi kebijakan tertulis atau manajemen sistem • Tingkat adopsi di kalangan UMKM masih belum merata, yang mencerminkan keterbatasan kapasitas dan perlunya dukungan berkelanjutan
 <p>Rencana dekarbonisasi Nasional (2018-2050)</p>	<p>Memperkenalkan rencana dekarbonisasi Nasional, peta jalan jangka panjang yang jelas menuju <i>net-zero</i> pada tahun 2050</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengukuran dan pelaporan emisi menjadi wajib, dengan sekitar 1.700 peternakan sapi melakukan MRV¹ emisi • Akses pembiayaan yang lebih mudah dan insentif yang lebih jelas bagi perusahaan untuk berinvestasi dalam teknologi bersih dan rendah emisi • Risiko iklim diintegrasikan ke dalam rencana usaha dan keuangan

1. Measurement, Reporting, and Verification (pengukuran, pelaporan, dan verifikasi)

Sumber: World Bank, wawancara ahli dengan mantan Koordinator - Urusan OECD dan akses ke Kosta Rika ke OECD di Kementerian perdagangan luar Negeri Kosta Rika



Colombia | OECD-aligned reforms implemented during accession improved foreign investment, trade, and sustainability

Country Fact 2024

GDP: USD 363 Bn

Population: 52 mn people

GDP per Capita: USD 6.9k

Accession Timeline: ~5 years (from IM)

2011 | Formal request

2013 | Roadmap for Accession

2014 | Initial Memorandum submitted

2020 | Formal membership confirmed

Positive impact of Colombia's OECD accession

Leading Indicator

0.03

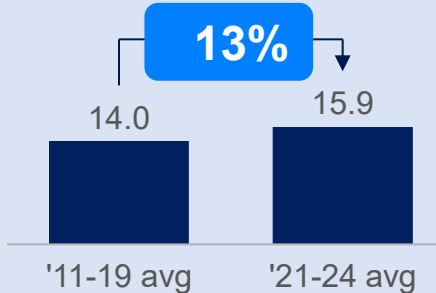
Indeks Pembatasan Regulasi FDI⁴
(0,16 untuk negara non-OECD (2024))

0.21

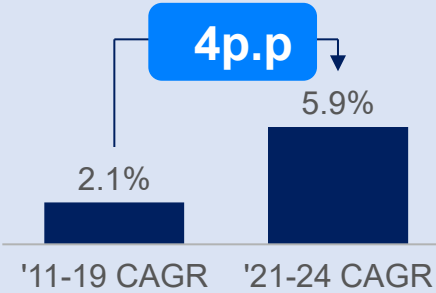
Indeks Pembatasan Perdagangan Jasa⁵
(0.30 untuk negara non-OECD (2025))

Lagging Indicator

Investasi Asing Langsung¹, \$ bn



Pertumbuhan CAGR Ekspor², %



Intensitas karbon PDB³, kgCO₂e



Key Reforms (related to Investment & Env. Policy)

- Eliminating **non-tariff regulatory barriers** (e.g. termination of "one for one" rule in freight vehicle import, reducing cost and easing market entry for business)
- Adoption of **international disclosure standards** and stricter **supply chain due-diligence requirements**
- Adoption of a **comprehensive waste management plan, incl. clearer** Extended Producer Responsibility, leading some industrial plants to achieve near-zero waste

1. Increase in average of FDI net inflows from 2011-2019 to 2021-2024, in current \$, 2. Exports of goods and services, in constant 2015 \$, 3. Reduction between year of formal request to join OECD (2011 for Colombia) and 2024 in kg CO₂e, constant 2015 \$; 4. Measuring statutory restrictions on FDI across countries and sectors (0 = fully open to foreign investment; 1 = fully closed); 5. measuring regulatory barriers to trade and investment in services sectors (0 = fully open to foreign investment; 1 = fully closed)

Source: World Bank, Expert Interview with Former Ambassador to OECD 2022-2023



Kolombia | Reformasi yang selaras dengan OECD yang dilaksanakan selama aksesinya meningkatkan investasi asing, perdagangan, dan keberlanjutan

Fakta negara 2024

PDB: USD 363 miliar

Populasi: 52 juta orang

PDB per kapita: USD 6,9K

Waktu Aksesinya: 5 tahun (dari IM)

2011 | Permohonan resmi

2013 | Peta jalan untuk Aksesinya

2014 | *Initial Memorandum*

2020 | Keanggotaan resmi dikonfirmasi

Dampak positif dari aksesinya OECD Kolombia

Leading Indicator

0.03

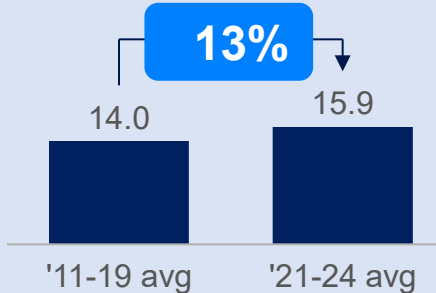
Indeks Pembatasan Regulasi FDI⁴
(0,16 untuk negara non-OECD (2024))

0.21

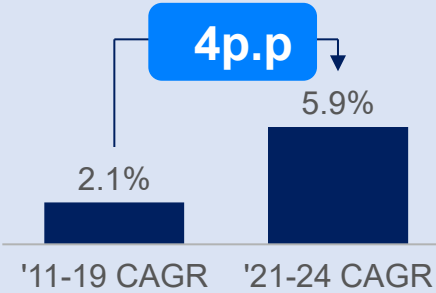
Indeks Pembatasan Perdagangan Jasa⁵
(0.30 untuk negara non-OECD (2025))

Lagging Indicator

Investasi Asing Langsung¹, \$ bn



Pertumbuhan CAGR Ekspor², %



Intensitas karbon PDB³, kgCO₂e



Reformasi Utama (terkait kebijakan investasi dan lingkungan)

- Penghapusan hambatan regulasi non-tarif** (misalnya penghapusan aturan “satu banding satu” dalam impor kendaraan angkutan barang, sehingga mengurangi biaya dan mempermudah masuknya pelaku usaha ke pasar)
- Penerapan standar keterbukaan informasi internasional dan persyaratan uji tuntas rantai pasok yang lebih ketat**
- Penerapan rencana pengelolaan limbah yang komprehensif**, termasuk kejelasan yang lebih baik mengenai Tanggung Jawab Produsen yang Diperluas (*Extended Producer Responsibility*), sehingga mendorong beberapa fasilitas industri mencapai tingkat limbah mendekati nol

1. Peningkatan rata-rata arus masuk bersih FDI dari 2011–2019 ke 2021–2024, dalam \$ saat ini; 2. Ekspor barang dan jasa, dalam \$ konstan tahun 2015; 3. Penurunan antara tahun pengajuan resmi untuk bergabung dengan OECD (2011 untuk Kolombia) dan 2024 dalam kg CO₂e, dengan dolar konstan tahun 2015; 4. Mengukur pembatasan regulasi yang bersifat statutori terhadap FDI di berbagai negara dan sektor (0 = sepenuhnya terbuka untuk investasi asing; 1 = sepenuhnya tertutup); 5. Mengukur hambatan regulasi terhadap perdagangan dan investasi di sektor jasa (0 = sepenuhnya terbuka untuk investasi asing; 1 = sepenuhnya tertutup)
Sumber: World Bank, wawancara pakar dengan mantan Duta Besar untuk OECD (2022–2023)



Kolombia – Pendalaman | Reformasi dilaksanakan dan dampaknya terhadap dunia usaha

Reformasi yang dilaksanakan di Kolombia (tidak menyeluruh)

	Detail reformasi	Bagaimana sektor bisnis Kolombia terpengaruh
 <p>Mengakhiri aturan "satu banding satu"</p>	<p>Menghapus persyaratan penghapusan truk lama dengan skema "satu banding satu", yang sebelumnya membatasi akses masuk ke pasar dan menunda registrasi kendaraan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pembaruan armada yang lebih cepat, dengan impor truk meningkat tiga kali lipat sejak 2019, sehingga meningkatkan kualitas kendaraan dan mengurangi emisi • Biaya yang lebih rendah dan efisiensi yang lebih tinggi bagi perusahaan transportasi melalui armada yang lebih baru dan pengiriman yang lebih andal
 <p>Standar Keterbukaan Informasi Internasional</p>	<p>Memperkuat tata kelola BUMN dengan memisahkan peran pemerintah sebagai pemilik dan regulator</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan transparansi dan keterbukaan informasi (misalnya melalui adopsi IFRS), yang mendukung kepercayaan investor • Persyaratan kepatuhan yang lebih jelas melalui aturan antikorupsi yang lebih kuat, uji tuntas rantai pasok, dan proses pengadaan yang lebih transparan
 <p>Manajemen limbah yang menyeluruh</p>	<p>Memperkenalkan kerangka kerja limbah nasional dan ekonomi sirkular, termasuk Extended Producer Responsibility (EPR) dan batasan pada plastik sekali pakai</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kewajiban daur ulang dan pemulihan yang bersifat wajib di bawah EPR, yang meningkatkan pemulihan material • Perbaikan operasional, termasuk sertifikasi "Zero Waste" di sebagian sektor pangan dan pengalihan lebih dari 50.000 ton limbah dari tempat pembuangan akhir



Korea Selatan | Akses OECD mempercepat transformasi Korea menjadi ekonomi berpendapatan tinggi yang didorong oleh inovasi

Dampak positif dari akses OECD Korea Selatan



Fakta negara 2024

 **PDB:** USD 1.917 miliar

 **Populasi:** 52 juta orang

 **PDB per kapita:** USD 37,1k

 **Waktu Akses:** 1-2 tahun (dari permohonan resmi)

- 1995 | Permohonan resmi
- 1996 | Keanggotaan resmi dikonfirmasi



1. Tahun rata-rata sekolah (5,4 tahun di 1970 sampai 10,6 tahun di 2000) dan buta huruf turun dari 13% di 1970 menjadi 2% di 1999
 Sumber: Korea dan OECD: 25 tahun dan seterusnya, World Bank

BAB 3: Relevansi dan Peran Dunia Usaha

Proses aksesasi OECD | Tinjauan proses aksesasi OECD, dan posisi Indonesia saat ini



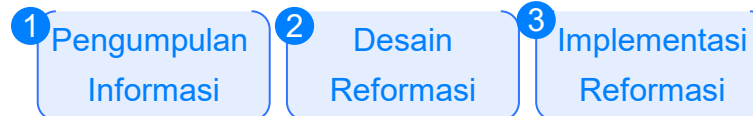
Pra-Aksesasi: Mendapat Undangan

Anggota OECD memutuskan **apakah akan mengundang suatu negara** untuk memulai aksesasi



Aksesasi: Membuktikan kesiapan untuk bergabung dengan OECD

Negara memasuki tahap **Tinjauan Teknis & akan menerapkan reformasi yang relevan**
Fase utama tinjauan teknis



25 komite OECD akan menilai kesiapan negara, dengan fokus pada:

- Kapasitas kelembagaan
- Keselarasan dengan kerangka OECD



Pasca Aksesasi: Tetap Akuntabel

Negara terus memenuhi **standar OECD**
Pemantauan & tinjauan berkelanjutan oleh negara-negara rekan

**Indonesia ada di sini
sekarang**

Indonesia telah menandatangani *Initial Memorandum*



Menteri Koordinator bidang perekonomian Airlangga Hartanto menyampaikan *Initial Memorandum* Indonesia kepada Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann di Paris, Prancis pada Pertemuan Tingkat Menteri Dewan OECD pada 3 Juni 2025, dengan didampingi Duta Besar Mohamad Oemar.

dan sekarang memasuki tahap *Technical Review*



Hal-hal yang perlu diantisipasi selanjutnya

- Menanggapi kuesioner OECD yang spesifik untuk masing-masing komite.....
- Menjadi tuan rumah bagi misi pencarian fakta dan misi teknis OECD.....
- Menyampaikan informasi tambahan kepada Sekretariat OECD untuk laporan latar belakang.....
- Berpartisipasi dalam pembahasan komite yang relevan.....
- Melaksanakan reformasi (sebagaimana diuraikan dalam surat Ketua dari masing-masing komite) untuk menunjukkan keselarasan dengan instrumen dan standar OECD

Indonesia menargetkan penyelesaian proses aksesinya dalam waktu **3-4 tahun pasca disampaikannya Dokumen *Initial Memorandum*.**

Indonesia akan dievaluasi oleh 25 komite OECD...

No	Komite	No	Komite
1	<i>Agriculture</i>	14	<i>Fisheries</i>
2	<i>Anti-Corruption</i>	15	<i>Health</i>
3	<i>Chemical</i>	16	<i>Investment</i>
4	<i>Competition</i>	17	<i>Public Governance</i>
5	<i>Consumer Policy</i>	18	<i>Regulatory Policy</i>
6	<i>Corporate Governance</i>	19	<i>Regional Development Policy</i>
7	<i>Digital Policy</i>	20	<i>Scientific & Technological Policy</i>
8	<i>Economic Development</i>	21	<i>Senior Budget Officials</i>
9	<i>Education</i>	22	<i>Shipbuilding</i>
10	<i>Employment, Labour & Social Affairs</i>	23	<i>Statistics</i>
11	<i>Environment</i>	24	<i>Steel</i>
12	<i>Fiscal Affairs</i>	25	<i>Trade</i>
13	<i>Financial Markets</i>		

... dan kesiapan dinilai melalui 2 elemen utama

Kapasitas Institusi

Evaluasi atas **keinginan dan kemampuan Indonesia untuk menerapkan instrumen hukum OECD yang bersifat substantif** yang berada dalam cakupan kewenangan komite

Keselarasan dengan kerangka hukum OECD

Penilaian terhadap **kesesuaian kebijakan, regulasi, dan praktik Indonesia** dengan instrumen hukum OECD yang bersifat substantif dalam lingkup masing-masing komite



Dunia Usaha |
Aksesi OECD
 merupakan
 upaya
 keseluruhan
 satu negara,
 dengan dunia
 usaha
 memainkan
 peran penting

Mengapa keterlibatan dini dengan dunia usaha penting



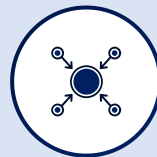
Membangun keselarasan dini atas reformasi prioritas

Keterlibatan sejak dini memungkinkan dunia usaha memengaruhi arah reformasi sejak awal, sehingga prioritas dan kekhawatiran sektor Anda tercermin sebelum kebijakan difinalisasi



Membantu memastikan penahapan dan pelaksanaan yang praktis

Wawasan operasional Anda membantu membentuk bagaimana reformasi diprioritaskan dan ditahapkan, sehingga mengurangi disrupti dan memastikan langkah-langkah yang diambil dapat diterapkan di berbagai industri



Memperkuat kepastian jangka panjang dan daya saing

Keterlibatan aktif mendukung terciptanya lingkungan regulasi yang lebih dapat diprediksi dan transparan, sehingga meningkatkan kepercayaan investasi dan peluang pertumbuhan jangka panjang



Tujuan
akhir

Aksesi OECD yang berhasil adalah **akses**
yang tepat waktu, memenuhi seluruh
persyaratan utama OECD, dan memberikan
dampak positif yang luas bagi seluruh negeri



Dunia Usaha | KADIN berada di posisi yang unik dalam mengkoordinasikan dunia usaha Indonesia selama akses OECD



Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN)

KADIN adalah ruang bisnis yang bertindak sebagai perwakilan komunitas bisnis Indonesia, menjembatani kepentingan pengusaha dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya

Peran KADIN



1 Titik koordinasi tunggal
Menghubungkan pemerintah dan dunia usaha untuk menyelaraskan masukan



2 Operasionalisasi keterlibatan
Membentuk dan memimpin kelompok kerja dunia usaha



3 Adopsi reformasi tahap akhir
Menyosialisasikan reformasi dan membangun kapasitas bagi dunia usaha

Baca selengkapnya:
<https://kadin.id/en/tentang-kadin/>

Structured engagement dengan KADIN dan pemangku kepentingan bisnis



Keterlibatan KADIN dalam Initial Memorandum



KADIN terlibat dalam pengumpulan Initial Memorandum Indonesia dengan berkolaborasi dengan Kemenko Perekonomian dan terlibat dalam diskusi potensi peluang dengan OECD dan BIAC



Keterlibatan KADIN dengan BIAC



Ketua KADIN bertemu dengan Sekretaris Jenderal OECD dan Direktur Eksekutif Business at OECD (BIAC) di Paris untuk mewakili Indonesia sebagai pengamat BIAC & menegaskan dukungan untuk akses OECD

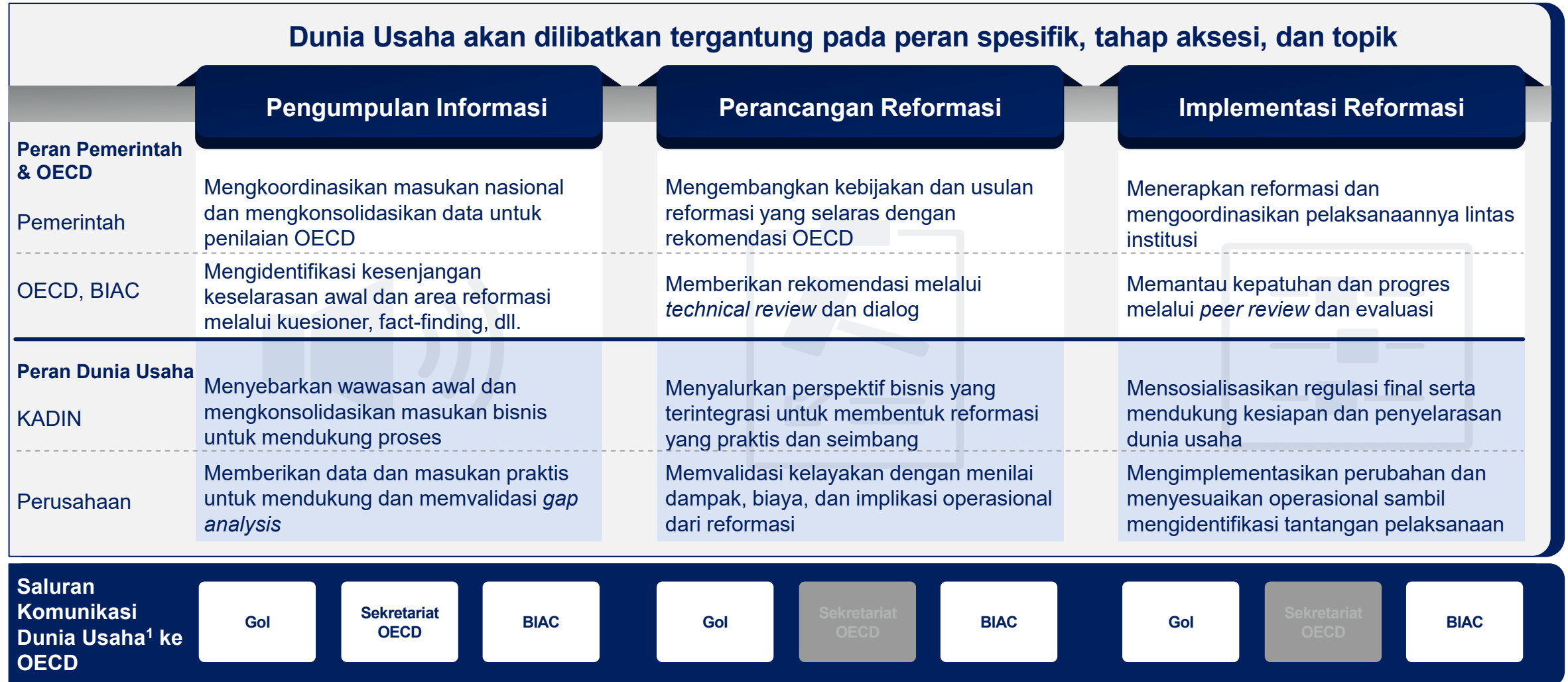


UK – ID Private Sector Roundtable



UK-ID Roundtable pada tanggal 19 Januari mempertemukan pemangku kepentingan utama dari UK & ID, sekaligus menandai **peluncuran resmi dukungan keterlibatan dunia usaha antara GG, KADIN & Kemenko Perekonomian**

Keterlibatan dunia usaha terjadi di berbagai tahap *technical review*, dengan peran dan saluran interaksi yang berkembang di setiap tahap



1. Gol = Pemerintah Indonesia, Sekretariat OECD, BIAC = Business at OECD – pendalaman di slide berikutnya



Private sector | Business at OECD (BIAC) merupakan perwakilan resmi dunia usaha di OECD

SIAPA BIAC

Business at OECD (BIAC) adalah perwakilan dunia usaha resmi di OECD

APA YANG DILAKUKAN BIAC

Bekerja sama dengan OECD dan pemerintah untuk memfasilitasi dialog dan menyampaikan perspektif, prioritas, posisi dunia usaha agar tercermin dalam proses perumusan kebijakan OECD

BAC DALAM ANGKA

3000+

Perwakilan bisnis

10 jt+

Perusahaan yang berafiliasi

Baca lebih lanjut: <https://www.businessatoecd.org/>

BAGAIMANA BIAC BERINTEAKSI DENGAN OECD

Sebagai perwakilan resmi dunia usaha di OECD, BIAC membawa perspektif dunia usaha ke dalam diskusi kebijakan OECD

Konsultasi tahunan dengan para Duta besar OECD

Pertemuan tahunan antara BIAC, kepemimpinan OECD, dan duta besar untuk membahas prioritas bisnis dan isu-isu ekonomi utama

Pertemuan tingkat Menteri OECD

Forum tingkat tinggi di mana para menteri OECD menetapkan arah kebijakan; BIAC memberikan masukan dan rekomendasi bisnis

Komite OECD

Pertemuan teknis di tingkat kerja untuk membahas kebijakan dan standar; BIAC mewakili pandangan dunia usaha dalam diskusi tersebut

Dialog B20-G20

Forum bisnis yang terkait dengan proses G20; BIAC menyalurkan perspektif bisnis ke dalam diskusi G20 dan OECD

BAB 4: Pendalaman Komite OECD

Dari 25 komite OECD yang akan meninjau Indonesia, buku panduan ini berfokus pada 4 area prioritas untuk analisis yang lebih mendalam

Indonesia akan dievaluasi oleh 25 komite OECD

No	Komite	No	Komite
1	<i>Agriculture</i>	14	<i>Fisheries</i>
2	<i>Anti-Corruption</i>	15	<i>Health</i>
3	<i>Chemical</i>	16	<i>Investment</i>
4	<i>Competition</i>	17	<i>Public Governance</i>
5	<i>Consumer Policy</i>	18	<i>Regulatory Policy</i>
6	<i>Corporate Governance</i>	19	<i>Regional Development Policy</i>
7	<i>Digital Policy</i>	20	<i>Scientific & Technological Policy</i>
8	<i>Economic Development</i>	21	<i>Senior Budget Officials</i>
9	<i>Education</i>	22	<i>Shipbuilding</i>
10	<i>Employment, Labour & Social Affairs</i>	23	<i>Statistics</i>
11	<i>Environment</i>	24	<i>Steel</i>
12	<i>Fiscal Affairs</i>	25	<i>Trade</i>
13	<i>Financial Markets</i>		



4 area kebijakan prioritas OECD yang dibahas dalam buku panduan ini

1

Trade

2

Investment

3

Environment

4

Corporate Governance

4 komite OECD utama yang relevan bagi dunia usaha Indonesia

Trade

Membantu negara memanfaatkan secara penuh peluang perdagangan dan menyesuaikan diri dengan perubahan pola perdagangan dengan menyediakan forum bagi kerja sama internasional, dialog, dan analisis kebijakan

Investment

Mendorong pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia melalui kerja sama internasional dan reformasi kebijakan untuk mendukung kebijakan investasi berkelanjutan

Environment

Mendukung reformasi kebijakan untuk melindungi dan memulihkan lingkungan, mencapai emisi *net-zero* pada 2050, menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati pada 2030, serta mengatasi polusi dan tantangan lingkungan terkait

Corp. Governance

Berkontribusi terhadap efisiensi ekonomi, pertumbuhan berkelanjutan, dan stabilitas keuangan melalui perbaikan kebijakan tata kelola perusahaan serta dukungan terhadap praktik perusahaan yang baik

Komite Perdagangan (*Trade*) | Mengapa hal ini penting bagi dunia usaha

Mandat

Membantu negara memanfaatkan secara penuh peluang perdagangan dan menyesuaikan diri dengan perubahan pola perdagangan dengan menyediakan forum bagi kerja sama internasional, dialog, dan analisis kebijakan



Tujuan utama

Mendorong **dialog terbuka** serta analisis kebijakan perdagangan yang **ketat dan objektif** untuk:

- Meningkatkan **pemahaman tentang isu-isu kebijakan perdagangan yang berkembang**;
- Membangun **dukungan untuk liberalisasi perdagangan** dalam sistem berbasis aturan;
- Memberikan kontribusi **informasi dan analisis objektif** untuk mendukung WTO dan negosiasi perdagangan lainnya;
- Memfasilitasi **penguatan koherensi** antara **kebijakan perdagangan dan kebijakan domestik dan internasional** terkait lainnya



Mendukung **penetapan prinsip-prinsip panduan bersama** dan pertukaran informasi mengenai sistem kredit ekspor resmi negara anggota



Meningkatkan **pemahaman tentang perdagangan dan pasar yang terbuka** melalui komunikasi yang terarah dan diseminasi hasil kerja komite



Komite Perdagangan (*Trade*) | Manfaat ini berlandaskan pada kerangka perdagangan OECD: prinsip untuk perdagangan yang terbuka, inklusif, dan aman



Komitmen terhadap Sistem Perdagangan Multilateral yang Terbuka dan Berbasis Aturan

Kebijakan perdagangan harus berlandaskan kuat pada aturan multilateral dan komitmen internasional, sehingga menyediakan kerangka yang stabil dan dapat diprediksi bagi perdagangan lintas negara dan integrasi ke pasar global



Akses Pasar yang Non-Diskriminatif dan Netralitas Persaingan

Langkah-langkah perdagangan harus memastikan perlakuan yang setara antar produk, perusahaan, dan mitra dagang, dengan menghindari intervensi yang bersifat diskriminatif, proteksionis, atau distorsif yang melemahkan persaingan yang adil



Tata Kelola Perdagangan dan *Enforcement Capacity* yang Efektif

Integritas perdagangan, termasuk kekayaan intelektual, harus dijaga melalui otoritas yang memiliki mandat jelas dan kapabilitas yang memadai, sistem kepabeanan dan penegakan yang kuat, serta koordinasi yang efektif antar lembaga domestik dan mitra internasional



Kerangka Kebijakan Perdagangan yang Transparan dan Dapat Diprediksi

Kerangka kebijakan perdagangan harus ditopang oleh aturan yang jelas dan dapat diakses publik, pemantauan berkala, serta mekanisme tinjauan yang terstruktur untuk memastikan akuntabilitas, pembelajaran kebijakan, dan keselarasan berkelanjutan dengan standar OECD

Komite Investasi (*Investment*) | Mengapa hal ini penting untuk dunia usaha

Mandat

Mendorong pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia melalui kerja sama internasional dan reformasi kebijakan untuk mendukung kebijakan investasi berkelanjutan

Tujuan utama



1 Mendorong **pasar yang terbuka, adil, dan efisien** melalui standar investasi OECD



2 Memperkuat **Responsible Business Conduct** dengan mendukung *due diligence* yang efektif dan keterlibatan *multi-stakeholder*



3 Membantu pemerintah dalam **memaksimalkan manfaat sosial dan ekonomi dari investasi internasional ke dalam dan ke luar** serta **memitigasi dampak buruk globalisasi**



4 Mempromosikan **adopsi dan penggunaan instrumen investasi dan alat kebijakan OECD secara efektif**



5 Memperkuat **penyusunan kebijakan berbasis bukti** melalui analisis, data, dan pengukuran tren investasi yang lebih baik



Komite Investasi (*Investment*) | Manfaat ini berlandaskan pada kerangka investasi OECD: Prinsip membentuk ekonomi terbuka, berkelanjutan, dan kredibel



Aturan investasi yang terbuka dan non-diskriminatif

Kerangka FDI harus terbuka, transparan, dan dapat diprediksi untuk memastikan perlakuan yang adil dan kepastian hukum, serta menghindari pembatasan yang tidak beralasan



Liberalisasi progresif atas modal dan jasa

Pergerakan modal, jasa lintas batas, dan pembayaran perlu diliberalisasi secara bertahap, dengan setiap kontrol yang masih tersisa bersifat terbatas, sementara, dan memiliki justifikasi yang jelas



Standar tertinggi *Responsible Business Conduct*

Perusahaan harus mengidentifikasi, mencegah, dan menangani dampak merugikan terhadap hak asasi manusia, ketenagakerjaan, lingkungan, antikorupsi, dan kepentingan konsumen di seluruh operasi dan rantai pasok



Perlindungan keamanan nasional yang terarah dan proporsional

Langkah yang jelas, transparan, dan proporsional diperlukan untuk mengatasi risiko keamanan tanpa bersifat proteksionis



Mendorong investasi berkualitas dengan hasil yang berkelanjutan

Kebijakan investasi harus mendorong produktivitas, keterampilan, ketahanan, dan keberlanjutan agar investasi berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berjangka panjang



Tata kelola dan akuntabilitas investasi yang kuat

Kebijakan investasi harus didukung oleh institusi yang kapabel, data yang transparan, dan tinjauan berkala untuk memastikan konsistensi, kredibilitas, dan implementasi yang efektif

Komite Lingkungan (*Environment*) | Mengapa hal ini penting untuk dunia usaha

Mandat

Mendukung reformasi kebijakan untuk melindungi dan memulihkan lingkungan, mencapai emisi *net-zero* pada 2050, menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati pada 2030, serta mengatasi polusi dan tantangan lingkungan terkait

Tujuan utama



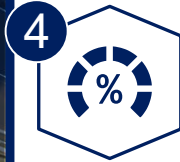
1 Mengembangkan standar yang **mendukung penanganan isu lingkungan secara efektif dan efisien secara ekonomi**



2 Mendorong **pembuatan kebijakan yang terintegrasi** dengan menyelaraskan tujuan lingkungan dengan kebijakan ekonomi, sosial, & sektoral dalam pendekatan pertumbuhan hijau dan pembangunan berkelanjutan



3 Memperkuat **kerja sama internasional dalam isu lingkungan** melalui dialog kebijakan, *peer exchange*, dan penelitian bersama



4 **Meningkatkan kinerja lingkungan** melalui tinjauan sistematis kebijakan nasional, praktik, dan komitmen internasional



5 Menyediakan **data, indikator, dan analisis lingkungan yang kuat**



Komite Lingkungan (*Environment*) | Manfaat ini berlandaskan pada kerangka lingkungan OECD: prinsip yang mendorong mandat lingkungan yang hemat biaya, berkelanjutan, dan terbuka



Perlindungan lingkungan yang terintegrasi ke dalam pengambilan keputusan ekonomi

Tujuan lingkungan harus diintegrasikan secara sistematis ke dalam kebijakan ekonomi, fiskal, sektoral, dan investasi untuk memisahkan dampak kerusakan lingkungan dari pertumbuhan ekonomi



Prinsip pencemar membayar dan internalisasi biaya lingkungan

Pihak yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan harus menanggung biaya pencegahan, mitigasi, dan pemulihan, sehingga harga mencerminkan eksternalitas lingkungan dan menghindari subsidi terhadap kegiatan yang merugikan



Instrumen kebijakan berbasis pasar dan hemat biaya

Tujuan lingkungan harus dicapai dengan menggunakan instrumen yang efisien seperti penetapan harga, pajak, izin yang dapat diperdagangkan, dan standar kinerja yang meminimalkan distorsi ekonomi serta mendorong inovasi



Transisi menuju pertumbuhan hijau dan ekonomi yang efisien dalam penggunaan sumber daya

Kebijakan harus mendorong model pertumbuhan rendah karbon, sirkular, dan efisien dalam penggunaan sumber daya yang menjaga modal alam sekaligus meningkatkan produktivitas, ketahanan, dan daya saing jangka panjang



Perlindungan keanekaragaman hayati dan ekosistem

Kegiatan ekonomi harus selaras dengan konservasi, restorasi, dan penggunaan ekosistem dan sumber daya alam yang berkelanjutan, mengintegrasikan pertimbangan keanekaragaman hayati ke dalam penggunaan lahan, produksi, dan keputusan infrastruktur



Tata kelola lingkungan, transparansi, dan penegakan yang kuat

Kebijakan lingkungan harus didukung oleh lembaga yang kuat, data berkualitas tinggi, akses publik terhadap informasi, penegakan yang efektif, dan akuntabilitas untuk memastikan kredibilitas dan kepatuhan

Komite Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*) | Mengapa hal ini penting untuk dunia usaha

Mandat

Berkontribusi terhadap efisiensi ekonomi, pertumbuhan berkelanjutan, dan stabilitas keuangan dengan memperbaiki kebijakan tata kelola perusahaan serta mendukung praktik perusahaan yang baik di negara anggota dan mitra

Tujuan utama



1 Memperkuat kapasitas pembuat kebijakan, regulator, dan pelaku pasar untuk **mengembangkan dan menerapkan kerangka kerja tata kelola perusahaan** yang **efisien** yang meningkatkan akses ke pasar modal, melindungi investor, dan mendukung keberlanjutan



2 Meningkatkan kemampuan pembuat kebijakan, regulator, dan pelaku pasar untuk **memantau dan menanggapi perkembangan pasar modal**, **memastikan tata kelola perusahaan tetap efektif dan sesuai dengan tujuan**



3 Memperkuat tata kelola perusahaan milik negara dan praktik privatisasi untuk **memprofesionalkan kepemilikan negara**, **memastikan tingkat lapangan bermain, menegakkan transparansi dan integritas**, dan **meningkatkan ketahanan jangka panjang**



Komite Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*) | Manfaat ini berlandaskan pada kerangka tata kelola OECD: kepercayaan dan akuntabilitas dalam korporasi, termasuk BUMN



Kerangka Tata Kelola Perusahaan yang Jelas dan Dapat Ditegakkan

Peraturan yang jelas dan dapat ditegakkan untuk mendefinisikan bagaimana perusahaan dikelola serta bagaimana kepatuhan dan akuntabilitas ditegakkan



Kepemilikan Negara yang Profesional dan Berjarak Wajar

Kepemilikan negara harus dijalankan secara profesional dan dipisahkan dari fungsi regulasi, sehingga BUMN beroperasi secara independen dan bersaing secara setara dengan perusahaan swasta



Lembaga yang Efektif dan Pengawasan yang Bertanggung Jawab

Memastikan dewan memiliki kompetensi dan akuntabilitas atas strategi, pengawasan manajemen, tata kelola risiko, dan integritas pengambilan keputusan perusahaan



Hak Pemegang Saham yang Kuat dan Perlakuan yang Setara

Melindungi hak pemegang saham (termasuk pemegang saham minoritas dan asing) melalui perlakuan yang adil, partisipasi dalam keputusan-keputusan penting, akses terhadap informasi yang tepat waktu, dan upaya pemulihan yang efektif



Standar Tinggi dalam Keterbukaan, Transparansi, dan Integritas

Informasi material mengenai keuangan, tata kelola, risiko, dan keberlanjutan diungkapkan secara tepat waktu, andal, dan dapat dibandingkan guna memungkinkan pengawasan, akuntabilitas, dan disiplin pasar



Nilai Jangka Panjang, Keberlanjutan, dan Ketahanan

Tata kelola perusahaan memastikan perusahaan mengelola risiko dan peluang jangka panjang, termasuk faktor lingkungan dan sosial, agar tetap tangguh

Perspektif BIAC | Kebijakan OECD secara langsung berdampak pada dunia usaha di berbagai sektor utama

BIAC memberikan penilaian yang lebih rinci mengenai relevansi OECD bagi dunia usaha dalam publikasi di bawah ini yang dapat diakses oleh publik

BUSINESS at OECD | Business and Industry Advisory Committee to the OECD

Why the OECD Matters for Business

A Cross-Sector Overview

Member Briefing
September 2025

Executive Summary

The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) is the primary international forum for the promotion of market-based economies that underpin democratic governance. Convening 38 member countries, the Organization's selective membership, evidence-based work, whole-of-government view and institutional integration of the private sector - through the Business and Industry Advisory Committee (Business at OECD) - give it a distinct profile among international organizations. Founded by 20¹ countries in 1961, the Organization's influence as a 'soft power' body has increasingly drawn global applicants² to adopt market-economic principles in the 21st century.

Given its membership, mission and unique features including the recognition of the private sector as a key stakeholder, the OECD impacts business across key policy areas:

- **Economic Governance:** The OECD is a global leader in economic and financial data collection and analysis, and promotes high-level standards for public governance and regulatory policy, ensuring businesses operate in a stable, predictable, and competitive environment. The OECD delivers high-impact economic intelligence, as its Economic Outlook, Global Debt Report, and Financial Market Trends Report offer data-driven insights into economic shifts, inflation risks, and financial stability, helping businesses refine investment strategies and better manage economic uncertainty. As the leading international forum for regulatory policy, OECD sets standards and principles to promote good regulatory practices and cross-border coherence, as fragmentation can trigger business compliance costs of up to 5-10% of annual turnover³. On finance, the Organization's 10+ standards strengthen regulatory practices, consumer protection, and digital finance, contributing to mitigate the USD 780 billion in annual costs due to regulatory fragmentation⁴, and creating a more resilient global financial system. With over 10 standards on competition policy, the OECD promotes competitive practices and transparent, market-driven policies internationally.
- **Trade and Investment:** By promoting open markets, regulatory coherence, and investment-friendly policies, the OECD enhances international competition and economic stability for international business. The OECD's 28 standards on international investment promote transparent policies, helping facilitate over USD 1,300 billion in global foreign direct investment (FDI) in 2023⁵. The Organization's Trade Policy Reports provide an inventory and guidance for the reduction of tariff and non-tariff barriers, with the Services Trade Restrictiveness Index covering 22 sectors, where reducing restrictions could boost trade by 40%⁶. The Trade Facilitation Indicators help reduce barriers, with trade facilitation potentially cutting costs by up to 13.2% for upper-middle-income countries⁷. OECD research further champions a level playing field, spotlighting the economic harm of non-market economy practices and industrial subsidies that contribute to overcapacity, economic distortion and discrimination. The OECD also creates guidelines covering the granting of USD 100 billion⁸ in sovereign export credits by OECD member states. Engaging Business at OECD in annual meetings of Trade Ministers and Global Fora, the OECD facilitates private-sector input to global trade decision-making. Its Critical Supply Chains Forum helps businesses

¹ Founding members were the United States and Canada alongside European countries that were part of the Organisation for European Economic Co-operation (OEEC).
² In 2025, OECD accession candidates included Argentina, Brazil, Bulgaria, Croatia, Indonesia, Peru, Romania and Thailand.
³ International Federation of Accountants & Business at OECD (BIAC) (2018). Regulatory Divergence: Risks, Costs and Issues.
⁴ OECD (2024). Investment in Global Trade: Transitioning to Trade Flows (White Paper).
⁵ OECD (2024). Trade Facilitation Indicators (White Paper).
⁶ OECD (2024). Trade Facilitation Indicators (White Paper).
⁷ European Commission (2024). Member States' Annual Activity Reports on Export Credits.

Why the OECD Matters for Business 3

What Makes the OECD Unique A Brief Overview

What is the OECD?

The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) is an international organization founded in 1961, which provides member governments with a forum for evidence-based dialogue and collaboration on economic and social policy priorities: From improving economic performance, fostering trade, investment, entrepreneurship and job creation, over leading global tax discussions to shaping the sustainability agenda. The OECD's members are 38 "like-minded" market-based democracies - many of which are high-income economies - committed to and tied together by shared standards and principles for the governance of markets.

How does the OECD impact business?

The OECD matters to the private sector, because the organization:

- **sets global standards & principles** including through more than 250 legal instruments in force;
- **promotes evidence-based policy recommendations** by promoting policy agendas that have direct impact on our business environment and competitiveness;
- **provides market data, information & strategic foresight** by analysing long-term trends and economic risks that impact our economies;
- **facilitates dialogue & stakeholder engagement** by providing a platform for exchanges through over 300 specialized OECD Committees, Working Parties and Expert Groups;
- **supports global governance** through close cooperation with key fora, including the WTO, the UN, or the G7 and G20 for which the OECD implements key mandates.

Is it different from other International Organizations?

The OECD cooperates closely with other IOs, including the WTO, ILO, UN, WCO, WIPO. In this context, several features give the OECD a distinct profile among IOs:

- **Like-mindedness:** The OECD is a forum for "like-minded" countries committed to market-based democracy.
- **Whole-of-government view:** The OECD covers policy-making across all major policy areas that affect the private sector, allowing the Organization to pinpoint coordination challenges across Ministries.
- **Evidence-based work:** OECD exchanges generally benefit from strong evidence, fact-based analysis and data, and the Organization's unique knowledge infrastructure.
- **Stakeholder collaboration:** The OECD has an institutionally enshrined relationship with the private sector and trade unions. Business at OECD (BIAC) has been the voice of the private sector since 1962.

How does the OECD engage with non-member countries?

The OECD engages with non-member countries to promote policy reforms and adherence to OECD standards, principles and good practices through partnerships, regional programs and the accession process.

Why the OECD Matters for Business 7

Why the OECD Matters for Business Economic Governance

1 Setting Global Standards & Principles

- **Regulatory Quality and International Coherence:** The OECD sets international standards on improving the Quality of Government Regulation, on better Regulatory Policy and Governance, and Agile Regulatory Governance to Harness Innovation. With the Best Practice Principles on International Regulatory Cooperation, the OECD consolidates its role as the only international forum with recognized expertise on regulatory policy. This work enhances regulatory transparency, reduces cross-border compliance costs, and promotes policy harmonization in international markets.
- **Competition Standards:** With over 10 standards on competition, the OECD sets different standards related to competition, covering areas such as intellectual property rights, transparency, procedural fairness, neutrality, and competition assessment. These standards serve as benchmarks for national policies, fostering market-oriented reform throughout the world, while encouraging governments to tackle anti-competitive practices.
- **Finance Standards:** With over 10 standards on financial market governance, the OECD provides a comprehensive framework for effective financial regulation, consumer protection, and digital finance. This contributes to promoting market stability, resilience, and efficiency across jurisdictions. Key recommendations include principles for financial regulation and private pension regulation.

This work enhances regulatory quality, promotes policy coherence in international markets, and reduces cross-border compliance costs. Cross-border regulatory divergence implies material costs for international business of 5-10% of annual turnover, for example for the financial sector¹⁴.

As the OECD promotes fair competition across 38 member countries and influences over 100 jurisdictions worldwide, it impacts businesses by promoting fair competition, efficiency, innovation and productivity.

In the financial sector, total inferred costs from international regulatory fragmentation are more than USD 780 billion annually¹⁵. This underlines the importance of OECD efforts to streamline compliance, enhance financial system resilience, and create a more predictable business environment, benefiting global financial institutions, consumers, and policymakers alike.

¹⁴ International Federation of Accountants & Business at OECD (BIAC) (2018). Regulatory Divergence: Risks, Costs and Issues.
¹⁵ International Federation of Accountants & Business at OECD (BIAC) (2018). Regulatory Divergence: Risks, Costs and Issues.

Why the OECD Matters for Business 8

Baca selengkapnya: <https://www.businessatoecd.org/hubfs/Why%20the%20OECD%20Matters%20-%20An%20Overview%20for%20the%20Private%20Sector.pdf>



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**



**Indonesian Chamber of
Commerce and Industry**

Supported by



Hubungi Kami

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Sekretariat Tim
Nasional OECD**
setnas.oecd@ekon.go.id



**Indonesian Chamber of
Commerce and Industry**

**Kadin Global Engagement Office
(Kadin GEO)**
geo@kadinindonesia.id